



TINGKAT PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 DAN 2020 DI TINJAU DARI FASILITAS SOSIAL

Abiyyu Faruq Asalat¹, Ahyuni²

¹Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

²Dosen Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: Faruq.asalat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis sebaran dan pemanfaatan fasilitas sosial di Kabupaten Padang Pariaman (2) menganalisis keterjangkauan fasilitas sosial dalam melayani masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Teknik dalam menentukan sampel penelitian menggunakan metode dokumentasi dan data-data sekunder yang di dapat dari instansi-instansi. Seperti data dari BPS, Bappeda, dan laporan dari hasil penelitian serta publikasi artikel terkait. Dari hasil penelitian, sebaran pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2015 sampai tahun 2020 untuk seluruh fasilitas pendidikan mengalami penambahan. Sementara, fasilitas kesehatan, puskesmas pembantu mengalami penurunan. Pola sebaran menyebar antara lain SMP, Rumah Sakit, dan Puskesmas. Pola sebaran acak antara lain SMA dan Pustu. Dan pola sebaran mengelompok SD. Akses keterjangkauan fasilitas sosial pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi fasilitas SD sebesar 35,81%, SMP 64,02%, SMA 72,2%, RS 27,35%, Puskesmas 91,07% dan Pustu 46,82%

Kata Kunci: Sebaran Fasilitas, Kesehatan, Tetangga Terdekat

Abstract

This research aims to (1) analyze the distribution and utilization of social facilities in Padang Pariaman Regency, (2) analyze the accessibility of social facilities in serving the community in Padang Pariaman Regency. The sampling technique used in this research employed documentation methods and secondary data obtained from various institutions such as the Central Bureau of Statistics (BPS), Regional Development Planning Agency (Bappeda), research reports, and relevant article publications. Based on the research findings, the distribution of education facilities in Padang Pariaman Regency showed an increase from 2015 to 2020. However, there was a decrease in the number of auxiliary health centers (puskesmas pembantu). The distribution pattern revealed that junior high schools (SMP), hospitals (rumah sakit), and health centers (puskesmas) were scattered. On the other hand, high schools (SMA) and sub-district health centers (pustu) exhibited a random distribution pattern. Elementary schools (SD) were found to be clustered. Regarding the accessibility of education and health social facilities in Padang Pariaman Regency, the results indicated that the accessibility percentages were as follows: 35.81% for elementary schools (SD), 64.02% for junior high schools (SMP), 72.2% for high schools (SMA), 27.35% for hospitals (RS), 91.07% for health centers (puskesmas), and 46.82% for sub-district health centers (pustu).

Keywords : Regional Development, Health, Nearest Neighbors

¹Mahasiswa Departemen Geografi Universitas Negeri Padang

¹Dosen Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan tuntutan bagi masyarakat untuk mencapai kemajuan, karena penduduk makin bertambah besar jumlahnya, maka kebutuhannya pun bertambah jumlahnya, jenisnya, dan kualitasnya, seiring dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Salah satu tujuan pokok pembangunan daerah adalah mengembangkan pembangunan wilayah-wilayah yang ada di dalamnya terutama dalam hal perkembangan antar wilayah di daerah tersebut (Adisasmita, 2010). Perkembangan suatu wilayah sangat terkait dengan faktor jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi wilayah, kependudukan dan aksesibilitas wilayah. Ketersediaan faktor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kemajuan suatu wilayah. Pusat perkembangan suatu wilayah yang umumnya juga berfungsi sebagai pusat pelayanan biasanya mempunyai fasilitas sarana yang lebih besar secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan fungsi dan perannya yang harus mampu memberikan pelayanan bagi wilayah sekitarnya.

Banyaknya permintaan akan jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi sangat sering berbanding terbalik dengan kemampuan wilayah untuk membangun. Wilayah yang kemampuannya sangat rendah justru membutuhkan tambahan pelayanan yang jauh lebih besar daripada wilayah yang mempunyai kemampuan membangun sangat tinggi, namun pada kenyataannya fasilitas-fasilitas sarana sosial ekonomi justru terkonsentrasi di pusat kota yang menjadikan daerah pusat ini akan semakin dipadati penduduk yang menuntut lebih banyak lagi fasilitas sarana sosial ekonomi. Kebutuhan penduduk wilayah di luar pusat kota yang belum terpenuhi mendorong arus penduduk menuju ke pusat-pusat fasilitas sarana sosial ekonomi, yaitu di pusat kota.

Perencanaan yang merata di semua wilayah yang tidak hanya di pusat kota

saja menjadi sangat penting, karena hal tersebut merupakan pendorong aktivitas ekonomi wilayah dan akan berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah. Namun permasalahan pokok yang senantiasa dihadapi dalam pembangunan antar wilayah tidak pernah terlepas dari adanya persoalan kesenjangan. Salah satu kesenjangan itu tampak pada tidak meratanya hasil-hasil pembangunan, dimana suatu wilayah dapat mencapai perkembangan yang sangat maju sedangkan wilayah lain masih terbelakang.

Kabupaten padang pariaman merupakan salah satu kabupaten di provinsi sumatra barat yang terbagi dalam 17 kecamatan yaitu meliputi kecamatan: kecamatan nan sabaris, kecamatan VII koto, kecamatan 2 x 11 kayu tanam, kecamatan 2 x 11 enam lingkung, kecamatan enam lingkung, kecamatan ulakan tapakis, kecamatan lubuk alung, kecamatan sintuk toboh gadang, kecamatan batang anai, kecamatan patamuan, kecamatan padang sago, kecamatan sungai geringging, kecamatan IV koto aur malintang, kecamatan batang gasan, kecamatan sungai limau, kecamatan V koto kampung dalam, kecamatan V koto timur. Kabupaten padang pariaman merupakan salah satu yang perkembangannya bagus dilihat dari jumlah PDRB kabupaten padang pariaman atas dasar harga berlaku yang tinggi di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, transportasi dan perdagangan. Selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 dan 2020 pada tabel 1 dimana sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan ketersediaan jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini juga tidak lepas karena kabupaten padang pariaman sebagian besar dilalui jalur lintas antar kota/kabupaten sehingga aksesibilitas wilayahpun mempunyai peranan dalam memacu tingkat perkembangan wilayah.

Berbagai macam jenis pembangunan fasilitas sarana sosial ekonomi di

Kabupaten ini diharapkan dapat berkembang secara baik dan merata untuk menunjang perkembangan wilayahnya. Upaya untuk menunjang perkembangan tersebut adalah dengan berusaha membangun berbagai jenis fasilitas sarana sosial ekonomi dengan asas pemerataan pembangunan agar nantinya tidak terjadi kesenjangan antar wilayah, sehingga dapat berkembang secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan penduduknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 dan 2020 di tinjau dari Fasilitas Sosial”**.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode Dokumentasi. metode dokumentasi. metode dokumentasi merupakan cara dan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, dan juga buku-buku tentang pendapat-pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah masalah penelitian (Rachman dalam Manggaraini, 2008). Metode studi dokumentasi yang digunakan dan diolah adalah data-data sekunder dari instansi-instansi yang terkait, antara lain BPS, Bappeda, dan laporan-laporan hasil penelitian serta publikasi lain.

Pada penelitian ini metode *Buffer* digunakan untuk menganalisis pola keterjangkauan fasilitas sosial di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan membuat *Buffer*, akan terbentuk suatu area yang melingkupi atau melindungi suatu obyek spasial dalam peta (*buffered object*) dengan jarak tertentu. Jadi zona-zona yang terbentuk secara grafis ini digunakan untuk mengidentifikasi kedekatan-kedekatan spasial suatu obyek peta terhadap obyek-obyek yang berada di sekitarnya. (Aqli, 2010). metode selanjutnya adalah Metode *Nearest Neighbourhood*, metode ini memanfaatkan keterhubungan antar data dengan menentukan kategori suatu data berdasarkan mayoritas kategori data terdekat. Dalam konteks perkembangan fasilitas sosial pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman, *metode nearest neigberhood* dapat digunakan untuk mengkategorikan wilayah yang memiliki fasilitas sosial pendidikan dan kesehatan yang serupa, serta mengukur jarak antara fasilitas-fasilitas sosial tersebut. Bentuk penyajian data kualitatif: (a) Teks naratif: berbentuk catatan lapangan; (b) Matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Fasilitas Sosial

a. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu fasilitas sosial yang memegang peranan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi kelangsungan hidup suatu bangsa serta fasilitas pendidikan erat hubungan nya dengan bentuk fisik suatu wilayah, Fasilitas pendidikan merupakan salah satu sarana yang harus di miliki dalam suatu wilayah. Melalui pendidikan akan

meningkatkan pengetahuan dan memberikan kolektif yang akan mempertemukan berbagai kelompok penduduk. Penyediaan fasilitas pendidikan ini harus dapat atau mampu menjawab kebutuhan yang beragam tersebut. Sekolah merupakan sarana utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan.

1) Fasilitas Sekolah Dasar

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa jumlah SD di Kabupaten Padang Pariaman memiliki jumlah 407 di tahun 2015 dan menjadi 409 pada tahun 2020 dari jumlah tersebut dapat dilihat pertumbuhan fasilitas sekolah dasar bertambah di kabupaten batang anai dan VII koto sungai sarik, dari banyak nya fasilitas sekolah dasar yang ada di kabupaten padang pariaman itu sudah cukup untuk menampung seluruh anak usia sekolah. Untuk melihat perkembangan Fasilitas pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Padang Pariaman akan di bandingkan dengan perkembangan fasilitas pendidikan di provinsi sumatera barat dengan melihat hasil persentasi yang dihitung dari 19 kabupaten/kota yang memiliki tingkat perkembangan pada tahun 2020 dengan angka 91,53% hasil persentasi perkembangan jika di bandingkan dengan perkembangan yang ada di kabupaten padang pariaman masih berada pada angka 35,81% dari hasil tersebut bisa dilihat bahwa perkembangan kabupaten padang pariaman masih jauh terlambat di bandingkan dengan perkembangan fasilitas pendidikan yang ada di provinsi sumatera barat.

2) Fasilitas Sekolah Menengah Pertama

Dari data yang didapat terlihat sekolah menengah pertama di kabupaten padang pariaman memiliki jumlah 60 sekolah pada tahun 2015 dan bertambah satu sekolah tahun 2020 menjadi 61 sekolah menengah yang bertambah satu sekolah di wilayah lubuk alung dilihat

pada peta 1.2 sebaran sekolah menengah pertama mencakup seluruh wilayah kabupaten padang pariaman. Tingkat perkembangan Fasilitas pendidikan Sekolah menengah pertama yang ada di Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 91,53% hasil tersebut di jumlahkan diluar kabupaten padang pariaman yang jika di bandingkan dengan kabupaten padang pariman yang berda pada angka 64,02% angka ini sudah menunjukkan perkembangan fasilitas sekolah menengah pertama di kabupaten padang pariaman sudah termasuk dalam kategori menengah.

3) Fasilitas Sekolah Menengah Atas

Fasilitas umum (fasos dan fasum) untuk menggambarkan fasilitas yang bisa digunakan publik. Dalam peraturan tentang fasilitas sosial, tidak ditemukan istilah fasom dan fasum. Fasum dan fasos adalah istilah untuk prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang pendekkan untuk mempermudah penyebutannya. Rozak (2020) fasilitas sosial adalah fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah maupun swasta untuk masyarakat. Fasilitas sosial diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam melaksanakan dalam aktifitasnya.

Namun dari data di atas kabupaten padang pariaman memiliki 23 sekolah menengah atas pada tahun 2015 dan hanya bertambah satu sekolah di kecamatan patamuan di tahun 2020 dan masih ada wilayah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan di sintuk toboh gadang yang menyebabkan anak usia sekolah harus pergi ke wilayah tetangga untuk mengenyam pendidikan pada tingkat sekolah atas hal tersebut juga dapat membuat hilangnya minat anak usia sekolah untuk merasakan pendidikan dan dapat berpengaruh pada sumber daya manusia. Perkembangan Fasilitas Sekolah Menengah Atas di Provinsi Sumatera barat berada pada angka 91,53% jika di bandingan dengan Kabupaten Padang Pariaman yang berada pada angka 72,27%

sudah termasuk tinggi untuk perkembangan fasilitas Pendidikan di salah satu Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

b. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu sarana yang penting untuk melihat perkembangan kabupaten/kota karena fasilitas kesehatan akan menunjang pelayanan kesehatan preventif seperti imunisasi, penyuluhan dan lainnya. Fasilitas kesehatan termasuk dalam pembagian Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Rumah Sakit, dimana setiap kategori fasilitas mempunyai perbedaan pelayanan yang ada, Seperti minimum pembangunan fasilitas puskesmas harus ada satu per kecamatan dan satu fasilitas Rumah sakit di Setiap kabupaten/kota. Untuk fasilitas kesehatan pada Perhitungan minimum pelayanan Berdasarkan perhitungan minimum pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah di kabupaten padang pariaman 2 rumah sakit, 5 puskesmas induk, dan 18 puskesmas pembantu sedangkan untuk melayani seluruh penduduk kabupaten padang pariaman adalah sebanyak 15 puskesmas pembantu 4 puskesmas, dan 2 rumah sakit, dari perkembangan pusat pelayanan kabupaten padang pariaman saat ini memiliki 2 rumah sakit, 25 puskesmas, dan 41 puskesmas pembantu, jika dibandingkan dengan perhitungan minimum pusat layanan kesehatan, kabupaten padang pariaman telah menyediakan pusat pelayanan kesehatan yang dapat melayani seluruh penduduknya.

Secara eksisting kabupaten padang pariaman mempunyai jumlah puskesmas induk, puskesmas pembantu serta rumah sakit yang dapat dikatakan menjangkau seluruh penduduk serta cakupan pelayanannya menjangkau seluruh penduduk (jika ditempatkan di lokasi yang tepat). Lokasi harus mudah dijangkau oleh masyarakat atau dekat ke

jalan raya dan tersedia infrastruktur dan fasilitas dengan mudah, misalnya tersedia pedestrian, Aksesibel untuk penyandang cacat. (DINKES RI 2003 dalam alkat melyn 2018)

1). Fasilitas Puskesmas Pembantu

Dari data yang di dapat kabupaten Padang pariaman memiliki jumlah fasilitas pembantu sebanyak 43 Puskesmas pembantu pada tahun 2015 dan mengalami pengurangan 1 fasilitas puskesmas pembantu di Kecamatan Batang Anai sehingga jumlah fasilitas puskesmas pembantu di kabupaten padang pariaman menjadi 42 di tahun 2020, Tingkat perkembangan Fasilitas Puskesmas Pembantu yang ada di kabupaten padang pariaman memiliki tingkat perkembangan sebesar 46,82% jika di bandingkan dengan tingkat perkembangan fasilitas puskesmas pembantu yang ada di Provinsi Sumatera Barat perkembangan pembangunan fasilitas puskesmas di kabupaten padang pariaman masih termasuk rendah karena perkembangan fasilitas yang ada di provinsi mencapai angka 94,92% hasil tersebut memunjukkan jauhnya tingkat perkembangan provinsi di bandingkan kabupaten nya.

2) Fasilitas Puskesmas

Berdasarkan data yang di peroleh jumlah puskesmas di kabupaten padang pariaman memiliki 25 fasilitas puskesmas dan tidak mengalami perkembangan karena di tahun 2020 jumlah fasilitas puskesmas di kabupaten padang pariaman masih sama. fasilitas puskesmas di kabupaten padang pariaman fasilitas puskesmas sudah memenuhi angka minimum dimana setiap kecamatan memiliki satu fasilitas puskesmas untuk melihat perkembangan maka hasil persentasi di kabupaten padang pariaman dibandingkan dengan hasil persentasi di provinsi, Perkembangan Fasilitas Puskesmas di Kabupaten padang pariaman mencapai angka persentasi 91,07% dari hasil ini bisa dilihat

perkembangan fasilitas kabupaten padang pariaman sudah termasuk tinggi jika di bandingkan dengan Provinsi Sumatera barat yang memiliki hasil 91,01% hasil ini menunjukan bahwa perkembangan sarana puskesmas di kabupten padang pariaman telah berada di atas perkembangan provinsi Sumatera barat.

3) Fasilitas Rumah Sakit

Dari data yang di peroleh kabupaten padang pariaman pada tahun 2015 hanya memiliki satu fasilitas rumah sakit di tahun 2015 dan bertambah satu fasilitas rumah sakit paru pada tahun 2020 Kabupaten Padang Pariaman memiliki jumlah 17 kecamatan dan 2 rumah sakit dimana satu rumah sakit umum daerah dan satu rumah sakit swata swata jika di lihat dari hasil persentasi di kabupaten padang pariaman hanya mencapai angka 27,35% jika dilihat dari pembangunan minimum fasilitas Kabupaten Padang Pariaman sudah memenuhi syarat minimum akan tetapi jika di bandingkan dengan persentasi Provinsi Sumatera Barat mencapai angka 96,77% dilihat dari hasil persentasi perkembangan fasilitas kesehatan di kabupaten padang pariaman termasuk dalam kategori lambat.

Perkembangan Fasilitas Sekolah Menengah Atas di Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 90,53% jika di bandingan dengan Kabupaten Padang Pariaman yang berada pada angka 72,27% sudah termasuk tinggi untuk perkembangan fasilitas Pendidikan di salah satu Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan tingkat perkembangan fasilitas kesehatan antara Kabupaten dan Provinsi.

Tabel 1. Perbandingan Fasilitas Kabupaten dengan Provinsi

No	Fasilitas Pendidikan Kabupaten	(%)	Fasilitas Pendidikan Provinsi	(%)
1	SD	35,81	SD	91,08
2	SMP	64,02	SMP	92,03
3	SMA	72,27	SMA	90,53

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebaran fasilitas sosial kesehatan dan pendidikan di kabupaten padang pariaman meliputi SD dengan pola sebaran mengelompok, SMP dengan pola sebaran meyebar, SMA dengan pola sebaran Acak, Rumah sakit dengan pola sebaran menyebar, Puskesmas dengan pola sebaran menyebar dan Puskesmas Pembantu dengan pola sebaran acak.
2. Akses keterjangkauan Fasilitas Sosial kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi Fasilitas SD dengan keterjangkauan sebesar 35,81% dari wilayah permukiman, SMP dengan keterjangkauan 64,02% dari wilayah permukiman, SMA dengan keterjangkauan 72,27% dari wilayah permukiman, Rumah Sakit dengan keterjangkauan 27,35% dari wilayah permukiman, Puskesmas dengan keterjangkauan 91,07% dari wilayah permukiman dan Puskesmas pembantu dengan keterjangkauan 46,82% dari wilayah permukiman.

SARAN

Setelah menganalisis hasil penelitian mengenai sebaran dan keterjangkauan fasilitas sosial yang di tinjau dari kesehatan dan pendidikan di kabupeten padang pariaman maka di dapat bebe rapa saran sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang telah di lakukan sebaran fasilitas sosial yang akan di bangun sebaiknya di dirikan di wilayah/kecamatan yang belum memiliki fasilitas atau masih bergantung ke wilayah tetangga sehingga sebaran fasilitas sosial dapat merata di seluruh wilayah permukiman agar mengurangi kesenjangan dan ketidakterediaan fasilitas sosial yang ada di kabupaten padang pariaman.
 2. Diharapkan kepada pemerintah lebih memperhatikan wilayah-wilayah keterbelakang yang ada di kabupaten padang pariaman di mana wilayah tersebut belum memiliki fasilitas sosial agar tidak hilangnya minat belajar bagi anak usia pendidikan dan menurunnya sumber daya manusia yang ada di kabupaten padang pariaman.
 3. Pembangunan Fasilitas Sosial di Kabupaten Padang Pariaman hendaknya di sama ratakan agar tidak ada nya perbedaan di antara wilayah tertinggal dan wilayah maju karena padang pariaman merupakan salah satu kabupaten yang besar di provinsi Sumatera Barat sehingga bisa memajukan kualitas pembangunan di kabupaten padang pariaman.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Adisasmita, Rahardjo, (2008), Pengembangan Wilayah: Konsep Dan Teori, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Aqli, W., Desember 2010. Analisa Buffer Dalam Sistem Informasi Geografis Untuk Perencanaan Ruang Kawasan. INERSIA, 2(2), Pp. 192-201.
- Badan Pusat Statistik 2015. Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka:BPS.
- Badan Pusat Statistik 2020. Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka:BPS.
- Budiharjo, Eko, Hardjonubojo, S. (1993). Kota Berwawasan Lingkungan. Bandung: Penerbit Alumni. 209
- Depdikbud., RI. 2003. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Depdikbud RI
- Christaller, W., 1966, *Central Place In Southern Germany*, Terjemahan Baskin, W.W, Wnglewoods Cliffs, N.J: Prentice Hall, Inc
- Depkes RI. 2003. Standar Sarana Dan Prasarana. Depkes RI: Jakarta.
- Depkes RI. 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Depkes RI: Jakarta
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Tujuan, Peranan Dan Manfaat Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan.
- Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018. Jakarta: Kemenkes RI; 2019.
- Melya, Alkat. 2018. ANALISIS DAN PEMETAAN SEBARAN FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015. Universitas Lampung
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Yulie, 2012, Teknik Buffering Pada Arcgis (Online), <https://Yuliesugiarti.WordprEss.Com/2012/12/19/Teknik-Buffering-PadaArcgis>